

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Robbin (1994), kinerja adalah ukuran hasil pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan kriteria yang disetujui bersama. Pengukuran kinerja (*measurement of performance*) adalah suatu proses memantau terus-menerus dan melaporkan hasil yang dicapai dari kegiatan, khususnya kemajuan menuju tujuan yang direncanakan. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa salah satu penilaiannya kinerja pemerintah daerah dalam bentuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD adalah sebuah proses pengumpulan sistematis dan analisis data kinerja operasional pemerintah daerah menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi dan membandingkan kinerja secara sistematis dan terus menerus atas kinerja pemerintah daerah. Menurut Nordiawan (2010) kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi *outcome*, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ukuran daerah menggambarkan besarnya daerah dengan melihat sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah atau total asetnya. Kusumawardani (2012) menyebutkan bahwa ukuran pemerintah yang besar akan mempermudah operasional yang kemudian akan memfasilitasi penyediaan berbagai layanan masyarakat. Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai pendukung utama pendapatan pokok daerah. Ukuran pemerintahan yang besar akan membawa kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan memudahkan penyampaian pelayanan masyarakat yang sesuai. Juga sangat mudah digunakan juga akan memberikan kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012). Hal ini sesuai dengan pendapat Sumarjo (2010) bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah utama

berada di bawah tekanan yang besar untuk mengungkapkan kinerja keuangan. Pemerintah daerah dipengungkapan laporan kinerja mereka akan lebih termotivasi untuk mengekspresikan sesuatu yang bersifat *Good news*. *Good news* dapat berupa: melaporkan kinerja pemerintah daerah yang baik sehingga meningkatkan poin kinerjanya.

Tingkat kekayaan daerah menggambarkan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri yang diprosikan dengan PAD yang diperoleh. Menurut Setiawan (2011), semakin besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri dan tidak tergantung kepada bantuan eksternal (pemerintah pusat dan atau provinsi). Lebih lanjut, Setiawan (2011) menyatakan bahwa semakin besar rasio PAD menunjukkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Dengan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat percaya akan kualitas kinerja Pemerintah Daerahnya.

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan (Prmono, 2008). Menurut Hall (2007) audit adalah bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli-auditor-yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen. Audit dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Audit eksternal seringkali disebut sebagai audit independen” karena dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Auditor eksternal mewakili berbagai kepentingan pemegang kepentingan pihak ke tiga atas perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor dan badan pemerintah (Hall, 2007). Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Mustikarini dan Fitriyasi (2012) menyimpulkan adanya hubungan antara pengukuran kinerja Pemda dan sistem pengawasan, termasuk audit kinerja dan evaluasi program. Semakin

banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut.

Berbagai alasan Pemerintah Daerah menginginkan opini WTP. Pertama, prestise atau kebanggaan telah mendapatkan peringkat opini terbaik/tertinggi, yaitu sebagai Pemerintah Daerah yang berhasil menyajikan secara wajar semua hal yang material terkait laporan keuangan yang sesuai dengan SAP. Kedua, banyak kalangan yang beranggapan bahwa dengan mendapatkan opini WTP berarti pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah tersebut telah dinyatakan bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, namun anggapan demikian tidak sepenuhnya benar. Ketiga, citra baik bagi pimpinan daerah, yang dapat digunakan secara politisi sebagai modal untuk maju kembali sebagai calon kepala daerah dimasa yang akan datang.

Kinerja pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung mengalami penurunan dibuktikan dengan turunnya opini dari WTP ke WDP. Kualitas laporan keuangan Pemkot Bandar Lampung masih banyak dipertanyakan terkait kewajarannya. Menurut Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Lampung Andri Yogatama masih ada beberapa catatan penting yang harus diperbaiki oleh Pemkot Bandar Lampung. Penyebab Kota Bandar Lampung tidak mendapatkan opini WTP yaitu karena adanya penggunaan restridikes sebesar Rp 49 M, jadi penggunaan dana DAK yang digunakan untuk kegiatan lain. Penyebab lainnya yaitu adanya pencatatan hutang yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, jadi ada lebih saji Rp 29 M dan transaksi kurang saji Rp 2 M. Selain itu, ada catatan-catatan seperti pada umumnya ialah asset yang tidak tertib (Suaralampung.id, 2021).

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Simartama (2019) yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara”. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yaitu 14 Kab/Kota di Provinsi Lampung dengan LKPD Tahun 2019-2021. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung”

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini akan dibatasi dengan hanya membahas terkait “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung” dimana dengan variabel karakteristik pemerintah daerah yaitu Ukuran Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan Total Aset, Tingkat Kekayaan Daerah yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tingkat Ketergantungan Pada Pusat yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU), dan Temuan Audit diproksikan dengan skor opini audit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Ukuran Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung?
2. Apakah Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung?
3. Apakah Tingkat Ketergantungan Pada Pusat berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung?
4. Apakah Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung.

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh temuan audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi serta sebagai bahan referensi dan bahan bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintahan Daerah

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif dan konstruktif bagi pemerintahan daerah dalam rangka memberikan kebijakan yang dilakukan di masa yang akan datang.

b. Manfaat Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan, informasi, pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai karakteristik pemerintah daerah yaitu ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat. Selain itu, manfaat bagi penulis yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

c. Manfaat Bagi Akademik sebagai bahan keputusan dan literature mahasiswa untuk melakukan penelitian berikutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini masing-masing terdiri dari beberapa bagian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini, seperti *grand theory*, peneliti terdahulu, kerangka piker, serta bangunan hipotesis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variable populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian deskripsi hasil penelitian serta analisis data dan bahasan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi.

BAB V SIMPULAN DAN BAHASAN

Bab ini berisikan simpulan dan saran atas penelitian serta saran-saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN